


LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA PT. BPR URBAN BALI

(PERIODE 31 DESEMBER 2024)

PT. BPR URBAN BALI

 Jl. Gatot Subroto Barat, No 108X, Kerobokan Kaja, Kuta Utara, Badung, Bali

 0361-761256 / 9396238  0811-3810-1818

 info@bankurban.co.id  www.bankurban.co.id

1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR

Nama BPR/BPRS	PT. BPR Urban Bali
Alamat	Jl. Gatot Subroto Barat, no 108X, Kerobokan, Badung, Bali
Nomor Telepon	(0361) 939 6238

Penjelasan Umum:

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) di PT. BPR Urban Bali pada tahun 2024 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja BPR meskipun menghadapi berbagai tantangan di tahun 2024 di tengah kondisi perekonomian dan sektor usaha yang belum sebelumnya pulih.

BPR Urban Bali memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga BPR Urban Bali dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di Bali. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR Urban Bali didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral serta signifikan dalam penerapan Penerapan Tata Kelola Perusahaan di lingkungan BPR Urban Bali. BPR Urban Bali telah beroperasi lebih dari 4 tahun setelah proses akuisisi berkembang, bertumbuh dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan

usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kesetaraan. Hal ini didorong oleh komitmen Bank untuk mencapai Visi yaitu menjadi penyedia layanan perbankan yang terpercaya dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan dukungan SDM yang kompeten untuk menciptakan nilai tambah bagi para nasabah.

Dalam penerapan Tata Kelola, BPR Urban Bali selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur & Infrastruktur, Proses, dan Hasil Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi intisari sekaligus fokus Bank dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan.

Di sepanjang 2024 dan untuk tahun mendatang, BPR Urban Bali terus berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan.

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola

Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	2. Baik
--	----------------

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Manajemen PT. BPR Urban Bali telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata

kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak cukup signifikan dan memerlukan perhatian dari manajemen BPR.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1. Nama

Drs I Wayan Sukendera

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dengan tidak mengindahkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
3. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Dalam rangka melaksanakan Tata Kelola, Direksi wajib memiliki satuan kerja dan fungsi paling kurang meliputi Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan.
5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Audit Intern Bank, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas lainnya.
6. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan peraturan perundangundangan.
7. Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian, antara lain kebijakan mengenai sistem rekrutmen, sistem promosi, sistem remunerasi serta rencana untuk melakukan efisiensi melalui pengurangan pegawai. Pengungkapan tersebut harus dilakukan melalui sarana yang dapat diketahui atau dapat diakses dengan mudah oleh pegawai.
8. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris, khususnya yang diperlukan dalam kaitan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh Direksi dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan Bank.
9. Memiliki serta melaksanakan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.
10. Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Direksi wajib memperhatikan Anggaran Dasar Bank.

2. Nama

I Nyoman Ananta Wijaya, SE, Ak

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dengan tidak mengindahkan peraturan

- perundangundangan yang berlaku.
3. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
 4. Dalam rangka melaksanakan Tata Kelola, Direksi wajib memiliki satuan kerja dan fungsi paling kurang meliputi Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan.
 5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Audit Intern Bank, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas lainnya.
 6. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan peraturan perundangundangan.
 7. Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian, antara lain kebijakan mengenai sistem rekrutmen, sistem promosi, sistem remunerasi serta rencana untuk melakukan efisiensi melalui pengurangan pegawai. Pengungkapan tersebut harus dilakukan melalui sarana yang dapat diketahui atau dapat diakses dengan mudah oleh pegawai.
 8. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris, khususnya yang diperlukan dalam kaitan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh Direksi dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan Bank.
 9. Memiliki serta melaksanakan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.
 10. Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Direksi wajib memperhatikan Anggaran Dasar Bank.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

- a. Direksi senantiasa melakukan upaya dalam menjaga seluruh rasio keuangan dalam kondisi sehat, diantaranya dengan pelaksanaan proses kredit yang baik dan sehat.
- b. Telah dilakukan upaya peningkatan penyaluran dana dengan penerbitan produk kredit yang lebih beragam guna meraih segmen kredit yang lebih luas.
- c. Rencana kerjasama linkage akan dilakukan dengan memperhatikan indikator rasio tingkat kesehatan dan menjunjung prinsip kehati-hatian.
- d. Pengelolaan IT pada tahun 2024 telah diupayakan dengan maksimal diantaranya dengan mengkaji ulang perjanjian kerjasama dengan vendor, mengkaji ulang PKS, dan meningkatkan sumber daya manusia pada bidang IT.
- e. Pengelolaan SDM telah dilakukan dengan memperhatikan peraturan perusahaan yang mengacu pada peraturan pemerintah dan kebijakan turunannya perihal ketenagakerjaan.
- f. Audit Internal secara berkala telah menyusun laporan audit dan dilakukan eskalasi ke bagian terkait guna pemenuhan seluruh temuan.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1. Nama **I Ketut Sutarsa**

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.

3. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
4. Dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR.
 - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga pelaksanaan tugas kepengurusan BPR tetap menjadi tanggung jawab Direksi.
6. Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
7. Dewan Komisaris wajib memberitahukan:
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;kepada OJK paling lambat 10 hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran, keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud.
8. Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.
9. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
10. Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya dalam menjalankan fungsi pengawasan, Komisaris wajib memperhatikan Anggaran Dasar BPR Urban Bali.
11. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
12. Melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi YMF Kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut. ✓

2. Nama

I Dewa Nyoman Budiastawa

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
4. Dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR.
 - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga pelaksanaan tugas kepengurusan BPR tetap menjadi tanggung jawab Direksi.
6. Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern

- BPR, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
7. Dewan Komisaris wajib memberitahukan:
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;kepada OJK paling lambat 10 hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran, keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud.
 8. Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.
 9. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
 10. Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya dalam menjalankan fungsi pengawasan, Komisaris wajib memperhatikan Anggaran Dasar BPR Urban Bali.
 11. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
 12. Melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi YMF Kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut.

Rekomendasi Kepada Direksi:

- a. Performance seluruh rasio keuangan Bank agar tetap dijaga dalam kondisi sehat.
- b. Performance bisnis agar ditingkatkan lagi dari sisi penyaluran dana (kredit) sehingga LDR dapat tercapai di angka 75 s/d 80%.
- c. Sumber pendanaan BPR, agar dipertimbangkan untuk melakukan kerjasama linkage dengan beberapa Bank Umum, untuk mitigasi terjadinya mismatch penghimpunan DPK dan penyaluran kredit.
- d. Pengelolaan IT secara keseluruhan agar mengikuti minimum requirement seperti aturan otoritas.
- e. Pengelolaan SDM agar selalu mengikuti undang-undang dan regulasi yang ada untuk meningkatkan engagement karyawan dan sebagai mitigasi risiko ketika terjadi Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)
- f. Pemenuhan dan tindak lanjut atas temuan Audit Internal, Audit Eksternal, dan Otoritas agar selalu dipenuhi sesuai dengan komitmen yang telah disepakati.

4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite:

Sesuai dengan jumlah modal inti yang dimiliki, PT. BPR Urban Bali belum memiliki kewajiban melakukan pembentukan Komite.

5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite:

Sesuai dengan jumlah modal inti yang dimiliki, PT. BPR Urban Bali belum memiliki kewajiban melakukan pembentukan Komite.

6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Drs I Wayan Sukendera
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	I Nyoman Ananta Wijaya,SE.Ak
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	I Ketut Sutarsa
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	I Dewa Nyoman Budiastawa
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada PT. BPR Urban Bali.

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Pemegang Saham BPR/BPRS

1.	Nama	Kadek Maharani Kemala Dewi
	Nama Kelompok Usaha BPR	CV Urban Beauty
	Persentase Kepemilikan (%)	30,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	30,00
2.	Nama	Kadek Maharani Kemala Dewi
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. Urban Indo Manufaktur
	Persentase Kepemilikan (%)	99,00

	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	99,00
3.	Nama	Kadek Maharani Kemala Dewi
	Nama Kelompok Usaha BPR	CV MS Glow Beauty
	Persentase Kepemilikan (%)	70,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	70,00
4.	Nama	Kadek Maharani Kemala Dewi
	Nama Kelompok Usaha BPR	CV Ms Glow Aesthetic Clinic Jakarta
	Persentase Kepemilikan (%)	91,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	91,00
5.	Nama	Kadek Maharani Kemala Dewi
	Nama Kelompok Usaha BPR	CV MS Glow Aesthetic Clinic Bintaro
	Persentase Kepemilikan (%)	100,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	100,00
6.	Nama	Kadek Maharani Kemala Dewi
	Nama Kelompok Usaha BPR	CV MS Glow Aesthetic Clinic Makasar
	Persentase Kepemilikan (%)	100,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	100,00
7.	Nama	Kadek Maharani Kemala Dewi
	Nama Kelompok Usaha BPR	CV MS Glow Aesthetic Clinic Semarang
	Persentase Kepemilikan (%)	100,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	100,00
8.	Nama	Kadek Maharani Kemala Dewi
	Nama Kelompok Usaha BPR	CV MS Glow Aesthetic Clinic Bogor
	Persentase Kepemilikan (%)	100,00

	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	100,00
9.	Nama	Kadek Maharani Kemala Dewi
	Nama Kelompok Usaha BPR	CV MS Glow Aesthetic Clinic Karawang
	Persentase Kepemilikan (%)	100,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	100,00
10.	Nama	Kadek Maharani Kemala Dewi
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT Urban Group Indonesia
	Persentase Kepemilikan (%)	99,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	99,00
11.	Nama	Kadek Maharani Kemala Dewi
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT Sadewi Ardhi Natha
	Persentase Kepemilikan (%)	30,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	30,00

Seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada kelompok usaha BPR. Pemegang Saham Pengendali memiliki saham pada 11 (sebelas) kelompok usaha.

8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1.	Nama	I Ketut Sutarsa
	Nama Bank/Perusahaan Lain	CV Taxsu Puja Group
	Persentase Kepemilikan (%)	90,00
2.	Nama	I Ketut Sutarsa
	Nama Bank/Perusahaan Lain	PT. Indo Bakeri dan Resto
	Persentase Kepemilikan (%)	1,00

3.	Nama	I Ketut Sutarsa
	Nama Bank/Perusahaan Lain	PT. Ombali Cargo Forwarder
	Persentase Kepemilikan (%)	1,00

Terdapat 1 (satu) orang Anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham pada Perusahaan Lain yang bukan merupakan Lembaga Keuangan. Komisaris Utama memiliki kepemilikan saham pada 3 (tiga) perusahaan lain non Bank.

9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Drs I Wayan Sukendera
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	I Nyoman Ananta Wijaya,SE.Ak
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	I Ketut Sutarsa
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan	Tidak ada



	Pemegang Saham Lain di BPR	
2.	Nama	I Dewa Nyoman Budiastawa
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

Tidak terdapat Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham yang memiliki hubungan keuangan.

10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

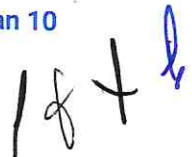
Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Drs. I Wayan Sukendera
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	I Dewa Nyoman Budiastawa - Saudara Ipar
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	I Dewa Nyoman Budiastawa
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Drs. I Wayan Sukendera - Saudara Ipar
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR



1.	Nama	Kadek Maharani Kemala Dewi
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Komang Vedanta Rama Krsna - Saudara Kandung

11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	Rp597.000.000
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	Rp468.000.000

1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	Rp116.383.400
Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	Rp68.115.750

1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tantiem	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)	Rp120.415.500
Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan	Rp125.034.500



Tantiem Komisaris (Rp)

1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)	Rp0

1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp)	Rp0

2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang)	2 orang
Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp)	Rp541.500.000
Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp)	Rp0

2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	2 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Direksi (Rp)	Rp39.324.000
Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	2 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Komisaris (Rp)	Rp60.756.000

2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

Kebijakan remunerasi yang diterima oleh Anggota Direksi antara lain Gaji, Tunjangan, dan Tantiem serta fasilitas transportasi berupa kendaraan roda empat dan asuransi kesehatan. Sementara kebijakan remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris antara lain Gaji, Tunjangan, dan Tantiem serta fasilitas asuransi kesehatan.

12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah

Rasio (a/b) 2,22 : 1

2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah

Rasio (a/b) 1,72 : 1

3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah

Rasio (a/b) 1,27 : 1

4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi

Rasio (a/b) 1,50 : 1

5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi

Rasio (a/b) 4,02 : 1

Rasio gaji sebagaimana dimaksud diatas merupakan gaji keseluruhan yang diterima mencakup gaji pokok dan tunjangan dalam 1 (satu) tahun.

13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

1. Tanggal Rapat 22 Maret 2024

Jumlah Peserta 11 orang

Topik/Materi Pembahasan:

Strategi bisnis guna meningkatkan segmen penyaluran dana yakni dengan pengembangan produk kredit kepada segmen Guru (PNS/PPPK), serta pembahasan isu strategis lainnya

2. Tanggal Rapat 18 Juni 2024

Jumlah Peserta 12 orang

Topik/Materi Pembahasan:

Rencana bisnis Bank utamanya perihal rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru yakni Mobile Banking, rencana pelaksanaan ISO, dan isu strategis lainnya.

	Tanggal Rapat	10 Juli 2024
	Jumlah Peserta	12 orang
	Topik/Materi Pembahasan:	
	Strategi bisnis guna meningkatkan penyaluran dan penghimpunan dana (melalui pengembangan produk), strategi dalam menjaga rasio kesehatan Bank, dan isu strategis lainnya.	
4.	Tanggal Rapat	10 September 2024
	Jumlah Peserta	12 orang
	Topik/Materi Pembahasan:	
	Evaluasi rencana bisnis Bank, strategi bisnis terkait pengembangan produk digital Mobile Banking, dan isu strategis lainnya.	
5.	Tanggal Rapat	23 Oktober 2024
	Jumlah Peserta	11 orang
	Topik/Materi Pembahasan:	
	Rencana bisnis Bank, isu-isu strategis Bank, evaluasi/penetapan kebijakan strategis, evaluasi rencana bisnis Bank.	

Selama tahun 2024 telah dilakukan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 5 (lima) kali.

14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

1.	Nama Anggota Dewan Komisaris	I Ketut Sutarsa
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	5 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir
2.	Nama Anggota Dewan Komisaris	I Dewa Nyoman Budiastawa
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	5 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir

Anggota Dewan Komisaris hadir secara fisik pada seluruh Rapat yang diadakan selama tahun 2025



15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses	0 kasus



Hukum Pada Tahun Laporan

1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses	0 kasus

Hukum Pada Tahun Laporan

Selama periode tahun 2024 (Tahun Laporan) tidak terdapat penyimpangan atau kecurangan intern (internal fraud) yang dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap pada PT. BPR Urban Bali.

16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

1.1. Permasalah Hukum yang Telah Selesai

Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) **0 kasus**

Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) **0 kasus**

1.2. Permasalah Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian

Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian **0 kasus**

Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian **0 kasus**

Selama tahun 2024 tidak terdapat permasalahan hukum yang dihadapi oleh Bank.

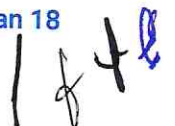
17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2024 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

1.	Tanggal Pelaksanaan	04 April 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat Umum
	Penjelasan Kegiatan	Pembagian takjil dalam rangka memperingati hari raya Idul Fitri yang dilakukan di depan Kantor BPR Urban Bali yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 108X, Kuta Utara, Badung, Bali.



	Jumlah (Rp)	Rp506.250
2.	Tanggal Pelaksanaan	03 Oktober 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat Umum
	Penjelasan Kegiatan	Pembagian dupa dalam rangka memperingati hari raya Galungan yang dilakukan di Pasar Anyar Sari Batu Kandik yang beralamat di Jl. Cargo, Denpasar, Bali, Indonesia.
	Jumlah (Rp)	Rp435.000
3.	Tanggal Pelaksanaan	19 Oktober 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Badan Penanaman Benoa
	Penjelasan Kegiatan	Kegiatan penanaman pohon bakau di Tanjung Benoa bekerjasama dengan Badan Penanaman Benoa. Biaya yang tercatat merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan pada kegiatan CSR mencakup biaya konsumsi dan lain sebagainya.
	Jumlah (Rp)	Rp6.775.000

Selama tahun 2024 BPR Urban Bali melakukan kegiatan sosial kepada masyarakat sebanyak 3 (tiga) kali. Selain 3 (tiga) kegiatan tersebut diatas, PT. BPR Urban Bali secara rutin menyumbangkan tempat sampah di lokasi-lokasi padat pengunjung seperti Pura dan lokasi lainnya pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh Bank.

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi BPR URBAN BALI untuk tahun 2024. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Badung, 28 April 2025

BPR URBAN BALI

Menyetujui

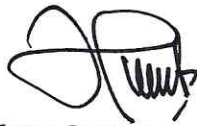


Drs I Wayan Sukendera
Direktur Utama



I Nyoman Ananta Wijaya
Direktur YMF Kepatuhan

Mengetahui



I Ketut Sutarsa
Komisaris Utama



I Dewa Nyoman Budiastawa
Komisaris

**KESIMPULAN UMUM
HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
TAHUN 2024**

Nama BPR : BPR URBAN BALI
 Alamat : JL GATOT SUBROTO BARAT NO 108 X KEROBOKAN
 KAJA KUTA UTARA, BADUNG - BALI
 Nomor Telepon : 0813996889
 Posisi Laporan : Tahun 2024
 Modal Inti : Rp22.749.024.160
 Total Aset : Rp275.825.390.927

No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor
1	Aspek Pemegang Saham	Nilai 2 (Memadai)
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	Nilai 2 (Memadai)
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	Nilai 2 (Memadai)
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	Tidak Dinilai
5	Penanganan Benturan Kepentingan	Nilai 2 (Memadai)
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	Nilai 2 (Memadai)
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	Nilai 2 (Memadai)
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	Nilai 2 (Memadai)
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	Nilai 2 (Memadai)
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	Nilai 2 (Memadai)
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	Nilai 2 (Memadai)
12	Rencana Bisnis BPR	Nilai 2 (Memadai)
Peringkat Komposit		2
Predikat Komposit		Baik

Kesimpulan

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

Faktor Positif

A. Faktor Positif Struktur dan Infrastruktur

1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa struktur dan infrastruktur Aspek Pemegang Saham BPR tergolong terpenuhi secara keseluruhan.
2. Hasil evaluasi menunjukkan struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi pada BPR berada dalam kondisi terpenuhi secara keseluruhan.
3. Struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris pada BPR saat ini dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
4. Struktur dan infrastruktur Penanganan Benturan Kepentingan pada BPR saat ini dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
5. Hasil evaluasi menunjukkan struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Kepatuhan pada BPR berada dalam kondisi terpenuhi secara keseluruhan.
6. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Intern dengan penilaian terpenuhi secara keseluruhan.
7. Penilaian terhadap struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Ekstern yang dimiliki BPR adalah terpenuhi secara keseluruhan.
8. Hasil evaluasi menunjukkan struktur dan infrastruktur Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud pada BPR berada dalam kondisi terpenuhi secara keseluruhan.
9. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan struktur dan infrastruktur Batas Maksimum Pemberian Kredit dengan penilaian terpenuhi secara keseluruhan.
10. Hasil penilaian menunjukkan bahwa struktur dan infrastruktur Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi BPR tergolong terpenuhi secara keseluruhan.
11. Hasil evaluasi menunjukkan struktur dan infrastruktur Rencana Bisnis BPR pada BPR berada dalam kondisi terpenuhi secara keseluruhan.

B. Faktor Positif Proses Penerapan Tata Kelola

1. Hasil evaluasi menunjukkan proses penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham pada BPR berada dalam kondisi memadai.
2. BPR memiliki proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi yang dinilai memadai.
3. Manajemen BPR telah menilai bahwa proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris berjalan dengan memadai.
4. Hasil evaluasi menunjukkan proses penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan pada BPR berada dalam kondisi memadai.
5. Manajemen BPR telah menilai bahwa proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan berjalan dengan memadai.
6. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern dengan pencapaian memadai.
7. Manajemen BPR telah menilai bahwa proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern berjalan dengan memadai.
8. Hasil penilaian menunjukkan bahwa proses penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud BPR tergolong memadai.
9. Hasil penilaian menunjukkan bahwa proses penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian

- Kredit BPR tergolong memadai
10. Berdasarkan hasil penilaian, proses penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi pada BPR dinilai memadai.
 11. Implementasi proses penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR di BPR menunjukkan kondisi memadai.

C. Faktor Positif Hasil Penerapan Tata Kelola

1. Ditinjau dari sisi regulasi, hasil penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham yang dimiliki BPR dinilai memadai.
2. Hasil evaluasi menunjukkan hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi pada BPR berada dalam kondisi memadai.
3. Hasil penilaian menunjukkan bahwa hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris BPR tergolong memadai.
4. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan hasil penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan dengan penilaian memadai.
5. Hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan pada BPR saat ini dinilai memadai.
6. Hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern pada BPR hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern dinilai memadai.
7. Hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern pada BPR saat ini dinilai memadai.
8. BPR telah mengimplementasikan hasil penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud dengan penilaian memadai.
9. Hasil evaluasi menunjukkan hasil penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit pada BPR berada dalam kondisi memadai.
10. BPR telah mengimplementasikan hasil penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi dengan penilaian memadai.
11. BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR hasil penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR yang dinilai memadai.

Faktor Negatif

A. Faktor Negatif Struktur dan Infrastruktur

Struktur dan Infrastruktur pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Anggota Direksi, Dewan Komisaris, serta struktur dan infrastruktur penerapan fungsi di BPR Urban Bali sejauh ini telah berjalan dengan baik dan dalam kondisi terpenuhi secara keseluruhan, namun perlu dilakukan penyempurnaan dan perbaikan secara terus menerus guna mencapai struktur dan infrastruktur dengan kondisi sangat memadai kedepannya.

B. Faktor Negatif Proses Penerapan Tata Kelola

1. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, pada BPR berada dalam kondisi cukup baik.
2. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/ atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR, yang dimiliki BPR dinilai cukup baik.

C. Faktor Negatif Hasil Penerapan Tata Kelola

1. Penilaian terhadap indikator Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi, yang dimiliki BPR adalah cukup baik.

Badung, 24 Januari 2025

BPR URBAN BALI

Disetujui



I Wayan Sukandera
Direktur Utama

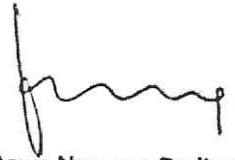


I Nyoman Ananta Wijaya, SE, Ak
Direktur YMEK

Mengetahui



Ketut Sutarsa
Komisaris Utama



I Dewa Nyoman Budiastawa
Komisaris

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Laporan Hasil Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola
BPR URBAN BALI Tahun 2024

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:


- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 9 Tahun 2024 tanggal 1 Juli 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
- 2 Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola BPR URBAN BALI selama tahun 2024. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Badung, 24 Januari 2025

BPR URBAN BALI

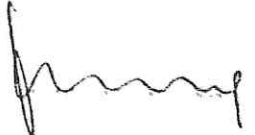
Disetujui


Drs I Wayan Sukendera
Direktur Utama


I Nyoman Ananta Wijaya, SE, Ak
Direktur YMK

Mengetahui


Ketut Sutarsa
Komisaris Utama


I Dewa Nyoman Budiastawa
Komisaris